



Analisis Wacana Kritis pada Ucapan Orang Tolol Sedunia Ahmad Sahroni dalam Dinamika Demonstrasi Publik

Mei Sekar Arum¹, Suryanto²

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang

Alamat: Jl. Woltermonginsidi No. 119 Pedurungan, Kota Semarang

Korespondensi penulis: sekararum2261@gmail.com suryanto.stikom@gmail.com

Abstract: *The political events in Indonesia during August–September 2025 illustrate how political language can escalate into large-scale social actions. This study analyzes the controversial statement made by Ahmad Sahroni, who labeled supporters of dissolving the parliament as “the dumbest people in the world.” His remark triggered nationwide protests, riots, and the erosion of both personal and institutional legitimacy. Drawing on Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA), this research examines the textual, discursive, and social practice dimensions of Sahroni’s case. Findings reveal that provocative language not only reflects elite ideological positioning but also shapes media discourse, influences public interpretation, and catalyzes tangible social mobilization. The article underscores the importance of critical literacy in understanding political communication within Indonesia’s contemporary democracy.*

Keywords: *Political Discourse, Ahmad Sahroni, Public Demonstration, Critical Discourse Analysis, Social Legitimacy*

Abstrak: Fenomena politik Indonesia pada Agustus–September 2025 menandai bagaimana bahasa politik dapat bertransformasi menjadi pemicu aksi sosial yang luas. Penelitian ini menganalisis ucapan kontroversial Ahmad Sahroni yang menyebut pihak pendukung pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Ucapan tersebut memicu gelombang demonstrasi nasional, kerusuhan, hingga delegitimasi politik personal maupun institusional. Dengan menggunakan kerangka Critical Discourse Analysis (CDA) Fairclough, penelitian ini menelaah dimensi teks, praktik wacana, dan praktik sosial dalam kasus Sahroni. Temuan menunjukkan bahwa bahasa provokatif tidak hanya merepresentasikan posisi ideologis elit, tetapi juga membentuk wacana media, memengaruhi interpretasi publik, dan mendorong mobilisasi sosial yang nyata. Artikel ini menegaskan pentingnya literasi kritis dalam memahami komunikasi politik di era demokrasi kontemporer Indonesia.

Kata Kunci: Wacana Politik, Ahmad Sahroni, Demonstrasi Publik, Critical Discourse Analysis, Legitimasi Sosial

1. LATAR BELAKANG

Fenomena politik di Indonesia sepanjang Agustus hingga September 2025 memperlihatkan dinamika yang sangat signifikan. Gelombang demonstrasi nasional dipicu oleh pernyataan Ahmad Sahroni, anggota DPR RI dari Partai NasDem, yang menyebut pihak yang menuntut pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Ucapan ini memunculkan perdebatan luas di media, sekaligus menyulut kemarahan publik yang berujung pada aksi protes di berbagai daerah. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi tragedi, termasuk bentrokan dengan aparat hingga kerusuhan di rumah pribadi Sahroni. Situasi ini menunjukkan betapa besar pengaruh bahasa politik terhadap dinamika sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks komunikasi politik, bahasa tidak pernah netral. Ia berfungsi sebagai instrumen penting untuk membentuk relasi kuasa, meneguhkan ideologi, sekaligus mengonstruksi legitimasi sosial. Hal ini sejalan dengan gagasan Norman Fairclough (2015) dalam kerangka Critical Discourse Analysis (CDA) yang menegaskan bahwa wacana bekerja pada tiga dimensi, yakni teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Dengan pendekatan ini,

ucapan seorang elit politik tidak hanya dipahami pada level linguistik, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang memiliki implikasi luas pada persepsi publik dan tindakan kolektif (UIN Saizu Journal, 2023).

Sejumlah kajian memperlihatkan relevansi CDA dalam membaca realitas sosial-politik Indonesia. Misalnya, penelitian tentang bahasa protes di ruang publik menunjukkan bahwa tulisan sederhana pada spanduk dapat berfungsi sebagai simbol ideologis yang memicu respons kolektif (Diglosia, 2022). Begitu pula kajian terhadap pemberitaan media nasional memperlihatkan bagaimana pilihan bahasa membentuk wacana nasionalisme dan memengaruhi konstruksi identitas kolektif (Isolèk, 2023). Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa bahasa merupakan medium ideologis yang sarat makna serta berimplikasi pada tindakan sosial.

Kajian lain terhadap ujaran politik tokoh publik, seperti penelitian atas pernyataan emosional Dedi Mulyadi, menunjukkan bahwa pilihan diksi yang tampak sederhana sesungguhnya mencerminkan relasi kuasa dan strategi ideologis tertentu (Arrus Journal, 2024). Dalam kerangka ini, ucapan Ahmad Sahroni yang bernada merendahkan publik dapat dipahami bukan sekadar sebagai kekhilafan, melainkan sebagai representasi simbolik yang menegaskan jarak antara elite politik dengan rakyat. Bahasa provokatif yang dilontarkan di ruang publik menjadi cara untuk melanggengkan otoritas sekaligus menegaskan suara kritis masyarakat.

Respons publik yang massif terhadap ucapan tersebut memperlihatkan keterhubungan erat antara wacana politik dan praktik sosial. Masyarakat menafsirkan pernyataan Sahroni sebagai simbol arogansi wakil rakyat, sehingga memunculkan aksi protes yang meluas. Narasi kolektif yang muncul dalam aksi massa memperlihatkan bagaimana bahasa elit dapat bertransformasi menjadi katalisator konsolidasi gerakan sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Snow dan Soule (2010) mengenai bagaimana frame politik mampu memicu mobilisasi ketika dimaknai ulang oleh publik.

Dengan kerangka CDA Fairclough, analisis terhadap kasus ini dapat mencakup tiga aspek. Pertama, analisis tekstual atas pilihan kata “tolol sedunia” yang merepresentasikan delegitimasi terhadap rakyat. Kedua, analisis praktik wacana untuk menelusuri bagaimana media memproduksi, menyebarkan, dan membingkai ucapan tersebut. Ketiga, analisis praktik sosial yang menempatkan ucapan Sahroni dalam konteks krisis kepercayaan terhadap DPR serta eskalasi konflik sosial. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif atas keterhubungan antara bahasa, produksi makna, dan konsekuensi sosial.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi. Minimnya kajian yang secara eksplisit menghubungkan antara ucapan elit politik dengan demonstrasi publik nyata

menandai adanya celah akademis yang perlu diisi. Analisis wacana kritis dalam penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana bahasa politik beroperasi tidak hanya sebagai representasi, tetapi juga sebagai agen yang memproduksi makna dan memengaruhi stabilitas sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur wacana ucapan Ahmad Sahroni, mengidentifikasi bagaimana media dan publik memaknai serta mendistribusikan ucapan tersebut, serta menguraikan keterkaitannya dengan dinamika demonstrasi publik. Dengan mengacu pada CDA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literasi kritis komunikasi politik serta memperluas pemahaman tentang peran bahasa dalam dinamika demokrasi kontemporer di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa bahasa bukanlah sarana netral, melainkan medium yang sarat dengan ideologi, kepentingan, serta relasi kuasa. Perspektif ini menjadi penting ketika menelaah ucapan Ahmad Sahroni mengenai “orang tolol sedunia” yang dengan cepat berkembang menjadi isu publik. Untuk membaca dinamika tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis wacana kritis, teori framing media, dan teori gerakan sosial sebagai pisau analisis. Ketiganya dipilih karena mampu menjelaskan keterhubungan antara wacana politik, reproduksi media, dan mobilisasi massa.

Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagaimana dikembangkan oleh Norman Fairclough (2015) menekankan pada tiga dimensi analisis, yakni teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Pada level teks, pilihan kata yang digunakan Sahroni memperlihatkan ekspresi kuasa yang direproduksi melalui ujaran politik. Pada level praktik wacana, pernyataan tersebut diproduksi ulang oleh media massa dan media digital sehingga memperluas jangkauan audiens. Sedangkan pada level praktik sosial, ujaran ini menegaskan ketimpangan relasi antara elit politik dengan publik, sekaligus memunculkan resistensi kolektif. Dengan demikian, AWK memungkinkan peneliti melihat keterkaitan langsung antara ujaran individual dengan struktur sosial yang lebih luas.

Selain AWK, teori framing media digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemberitaan mengenai ucapan Sahroni dibingkai sedemikian rupa sehingga membentuk opini publik. Entman (2019) menyatakan bahwa framing tidak hanya memilih isu tertentu untuk ditonjolkan, tetapi juga mengarahkan audiens pada cara tertentu dalam memaknai isu tersebut. Dalam kasus ini, media menyoroti frasa “orang tolol sedunia” sebagai elemen kontroversial, yang bukan

hanya meningkatkan daya tarik berita, tetapi juga memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga legislatif. Proses framing ini menjadikan ucapan individu berubah menjadi isu politik yang lebih luas.

Framing juga memperlihatkan bagaimana media dapat menjadi katalis dalam menghubungkan wacana politik dengan respons sosial. Liputan yang berulang dan bersifat sensasional membuat publik lebih mudah menangkap ucapan Sahroni sebagai simbol ketidakpuasan terhadap DPR. Dengan kata lain, media berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif yang mengonstruksi realitas politik. Konteks ini menunjukkan bahwa pernyataan seorang politisi dapat memperoleh makna baru ketika diproses melalui logika media.

Sementara itu, teori gerakan sosial digunakan untuk membaca bagaimana ujaran tersebut memicu aksi kolektif dalam bentuk demonstrasi publik. Menurut Tilly dan Tarrow (2015), gerakan sosial sering kali dimulai dari adanya *mobilizing discourse* atau wacana pemicu yang mampu menyatukan keresahan bersama. Ucapan Sahroni dalam hal ini menjadi titik temu yang menyatukan berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda untuk melakukan aksi bersama. Snow dan Soule (2010) menambahkan bahwa mobilisasi efektif ketika ada *collective action frames* yang memperkuat solidaritas antarindividu. Transformasi frasa “orang tolol sedunia” menjadi slogan dalam protes jalanan merupakan bukti konkret dari proses ini.

Ketiga kerangka teoritis tersebut saling melengkapi dalam membaca kasus Sahroni. Analisis Wacana Kritis menjelaskan dimensi ideologis dan relasi kuasa yang terkandung dalam ujaran politik, teori framing media menyoroti peran media dalam memperbesar gaung ujaran tersebut, sementara teori gerakan sosial memperlihatkan bagaimana ujaran dapat dimobilisasi menjadi aksi kolektif. Dengan kombinasi ini, penelitian mampu menangkap kompleksitas hubungan antara bahasa elit politik, konstruksi media, dan respon sosial yang terjadi dalam dinamika demonstrasi publik kontemporer di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis berbasis model Norman Fairclough yang menekankan tiga dimensi yakni teks praktik wacana dan praktik sosial. Analisis wacana kritis dipilih karena memandang bahasa bukan hanya alat komunikasi melainkan juga praktik sosial yang sarat ideologi dan kekuasaan (Fairclough, 2015; Wodak & Meyer, 2016). Dengan pendekatan ini ucapan Ahmad Sahroni dianalisis tidak

hanya dari struktur kebahasaannya tetapi juga bagaimana ia diproduksi disebarakan serta dimaknai dalam konteks sosial politik Indonesia.

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Data primer berupa video lengkap ucapan Ahmad Sahroni dan transkrip verbatim yang disusun secara teliti dengan penanda waktu. Data sekunder mencakup dua puluh empat artikel pemberitaan dari media nasional dan daerah delapan artikel opini serta seratus lima puluh unggahan warganet dari platform X dan TikTok yang mengandung kata kunci relevan. Dokumentasi digital dilakukan dengan mengunduh dan mengarsipkan semua data agar jejak informasi stabil sepanjang proses analisis (Creswell, 2018).

Teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling yaitu pemilihan data secara sengaja berdasarkan kriteria relevansi dan variasi. Proses sampling dimulai dengan penelusuran kata kunci yang berhubungan langsung dengan ucapan Ahmad Sahroni kemudian dilanjutkan dengan pemilihan artikel berita unggahan media sosial dan opini publik yang memenuhi kriteria inklusi. Kriteria tersebut adalah memuat rujukan langsung terhadap ucapan berada dalam rentang waktu peristiwa dan dapat diakses penuh. Purposive sampling dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap variasi yang kaya dari wacana publik serta mendalami fenomena yang spesifik (Moleong, 2019; Etikan, 2017). Sampel ditetapkan hingga mencapai titik jenuh di mana penambahan data tidak lagi menghasilkan kategori baru.

Analisis data dilakukan dengan mengacu pada tiga tahapan model Fairclough. Pada tahap teks analisis diarahkan pada pilihan leksikal metafora modalitas labeling dan intertekstualitas. Tahap praktik wacana menyoroti proses produksi penyebaran dan framing wacana melalui media. Tahap praktik sosial menghubungkan temuan dengan konteks krisis kepercayaan publik terhadap DPR dan eskalasi demonstrasi. Pengodean dilakukan dengan buku kode yang disusun berdasarkan literatur CDA. Dua peneliti melakukan pengodean mandiri terhadap sepuluh persen korpus untuk menguji reliabilitas awal kemudian hasilnya dihitung dengan Cohen's kappa dengan target minimal 0,75 (Krippendorff, 2019). Perbedaan hasil pengodean diselesaikan melalui diskusi hingga tercapai konsensus.

Untuk menjaga keabsahan penelitian digunakan teknik triangulasi sumber metode dan peneliti. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan video asli pemberitaan media dan percakapan warganet. Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan pembacaan mendalam analisis wacana kritis dengan pencatatan tema berulang. Triangulasi peneliti diterapkan melalui pengodean ganda dan diskusi sejawat yang terdokumentasi. Audit trail disusun dalam bentuk memo analitis catatan log keputusan dan revisi buku kode. Prinsip etika dijaga melalui anonimisasi akun non publik dan pembatasan kutipan hanya pada materi yang

tersedia umum. Refleksivitas peneliti turut dicatat agar bias interpretasi dapat diminimalkan sepanjang proses analisis (Lincoln & Guba, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan Data Empiris

Pernyataan Ahmad Sahroni pada 22 Agustus 2025 di Medan memicu kontroversi luas dalam ruang publik Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, ia menyebut pihak yang mendukung gagasan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia.” Ucapan ini bukan hanya sebuah reaksi spontan terhadap kritik, melainkan bentuk wacana yang mengandung relasi kuasa antara elit politik dan masyarakat. Dalam studi wacana, bahasa seperti ini dipandang mampu mereproduksi posisi dominasi maupun resistensi (Fairclough, 2015).

Pasca pernyataan tersebut, media sosial menjadi arena pertama di mana respon publik bermunculan. Tagar #BubarkanDPR segera ramai diperbincangkan dan menempati posisi teratas dalam percakapan daring. Publik tidak hanya menyebarkan ulang potongan ucapan Sahroni, tetapi juga memproduksi konten tandingan seperti parodi, video sindiran, hingga tantangan debat terbuka. Fenomena ini menggambarkan bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang diskursif yang memungkinkan masyarakat mendistribusikan narasi alternatif terhadap elit (Papacharissi, 2016).

Media arus utama kemudian memperluas jangkauan isu ini. Berbagai portal berita menyoroti frasa “orang tolol sedunia” dalam judul dan isi pemberitaan, sehingga pernyataan tersebut menjadi kutipan dominan dalam wacana publik. Praktik ini memperlihatkan bagaimana framing media dapat memperkuat aspek tertentu dari sebuah peristiwa dan pada saat yang sama mengarahkan opini publik (Entman, 2019). Dengan demikian, kontroversi yang bermula dari satu forum lokal berkembang menjadi isu nasional.

Gelombang protes kemudian bermunculan. Demonstrasi awal berlangsung di depan Gedung DPR RI dan di sejumlah titik di Jakarta, lalu menjalar ke beberapa kota lain di Indonesia. Aksi tersebut memperlihatkan transformasi dari perdebatan di ruang digital menjadi mobilisasi di ruang publik. Literatur mengenai gerakan sosial menunjukkan bahwa mobilisasi sering kali diawali dengan pemicu simbolik yang dianggap mewakili kekecewaan kolektif (Tilly & Tarrow, 2015). Dalam kasus ini, ucapan Sahroni berfungsi sebagai simbol yang mempersatukan ekspresi ketidakpuasan publik.

Situasi semakin memanas ketika data pribadi Ahmad Sahroni berupa alamat rumah, nomor telepon, dan informasi sensitif lainnya tersebar di media sosial. Publikasi data tersebut

mendorong sebagian massa untuk mengalihkan protes ke kediaman pribadinya di Tanjung Priok. Perpindahan arena protes ini memperlihatkan bagaimana keterhubungan antara ruang digital dan ruang fisik dapat memperluas dampak sebuah wacana politik (van Dijk, 2018).

Protes di rumah Sahroni yang semula berbentuk aksi massa kemudian berubah menjadi kerusuhan. Rumahnya dirusak, sejumlah barang pribadi dijarah, dan ketegangan baru dapat dikendalikan setelah aparat keamanan turun tangan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ujaran politik tidak berhenti pada level simbolik, tetapi dapat mendorong aksi kolektif yang berimplikasi sosial maupun hukum (Snow & Soule, 2010).

Dalam ranah politik formal, Partai NasDem merespons cepat dengan merotasi posisi Sahroni dari Komisi III ke Komisi I. Namun langkah ini tidak cukup meredakan ketegangan, terutama setelah muncul laporan bahwa ia meninggalkan Indonesia di tengah situasi kritis. Akhirnya, pada 31 Agustus 2025 partai secara resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR RI efektif mulai 1 September 2025. Keputusan ini menutup rangkaian eskalasi, sekaligus menegaskan bahwa sebuah ucapan politik dapat berimplikasi pada runtuhnya legitimasi personal dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi politik (Norris, 2011).

Analisis Tekstual Ujaran Ahmad Sahroni

Ucapan Ahmad Sahroni yang menyebut pendukung pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia” bukan sekadar ekspresi spontan, melainkan praktik wacana yang mencerminkan relasi kuasa antara elit politik dan masyarakat. Dalam perspektif analisis wacana kritis, setiap ujaran selalu merepresentasikan posisi ideologis tertentu serta berfungsi dalam struktur sosial yang lebih luas (Fairclough, 2015). Dengan demikian, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan otoritas lembaga legislatif yang sedang menghadapi krisis legitimasi.

Pilihan kata “tolol” menandakan strategi linguistik yang bersifat delegitimasi. Istilah ini secara langsung merendahkan lawan wacana, yakni masyarakat yang mendukung pembubaran DPR. Sementara itu, hiperbola “sedunia” menambah bobot intensitas, seakan-akan kritik yang muncul bukan hanya keliru, tetapi juga absurd secara universal. Strategi hiperbolis dalam wacana politik berfungsi untuk memperkuat superioritas pembicara sekaligus melemahkan posisi lawan (van Dijk, 2018).

Lebih jauh, penggunaan frasa “mental manusia tertolol” menunjukkan praktik patologisasi kritik. Dengan mengaitkan sikap kritis dengan gangguan mental, Sahroni berusaha mendiskualifikasi argumen substantif publik. Dalam kajian *critical discourse studies*, strategi semacam ini disebut sebagai bentuk delegitimasi personal yang menggeser kritik politik

menjadi persoalan moral atau psikologis (Wodak & Meyer, 2016). Dampaknya, ruang diskusi rasional menyempit karena kritik dipandang tidak sah sejak awal.

Ujaran ini juga menampilkan pola oposisi biner yang khas dalam wacana politik. Sahroni menempatkan dirinya dan lembaga DPR pada posisi “rasional” dan “beradab,” sementara lawannya diposisikan sebagai “irasional” dan “tidak beradab.” Oposisi semacam ini memperkuat hierarki simbolik antara elit dan masyarakat. Menurut teori socio-cognitive van Dijk (2018), pembentukan oposisi semacam itu berfungsi untuk melanggengkan dominasi elit melalui internalisasi makna yang merugikan kelompok subordinat.

Namun, ujaran tersebut tidak berhenti pada tataran tekstual. Begitu masuk ke ruang digital, makna yang terkandung di dalamnya diproduksi ulang oleh publik. Menurut KhosraviNik (2020), media sosial adalah arena kontestasi di mana teks politik mengalami pergeseran makna melalui reappropriasi oleh warganet. Frasa “orang tolol sedunia” berubah menjadi meme, sindiran, dan slogan tandingan yang justru melemahkan posisi Sahroni sebagai elit. Di sini, kontrol pembicara atas makna nyaris hilang, karena publik mengambil alih interpretasi.

Media arus utama ikut berperan memperluas resonansi wacana tersebut. Dengan menjadikan frasa kontroversial sebagai judul dan sorotan utama, media memperkuat persepsi publik bahwa pernyataan itu adalah representasi sah dari sikap seorang anggota DPR. Praktik framing ini selaras dengan teori Entman (2019) bahwa media berperan dalam menonjolkan aspek tertentu dari realitas untuk membentuk cara publik memahaminya. Akibatnya, pernyataan Sahroni tidak bisa lagi dipisahkan dari citra DPR secara kelembagaan.

Dalam perspektif CDA, kasus ini memperlihatkan keterhubungan erat antara teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Ujaran yang dimulai dari forum resmi, direproduksi media, lalu dipolitisasi di ruang digital, pada akhirnya bermuara pada aksi kolektif di jalanan. Proses ini sejalan dengan pandangan Fairclough (2020) bahwa bahasa tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga membentuk praktik sosial baru yang berimplikasi pada relasi kuasa.

Analisis tekstual ini juga menyingkap bagaimana elit politik menggunakan strategi bahasa untuk mempertahankan legitimasi di tengah krisis kepercayaan publik. Namun, strategi yang dipilih Sahroni justru kontraproduktif. Alih-alih memperkuat posisi DPR, ujaran tersebut memicu resistensi yang semakin melemahkan legitimasi lembaga. Dalam hal ini, teks politik dapat menjadi pisau bermata dua, yang tidak hanya membangun otoritas, tetapi juga berpotensi meruntuhkannya.

Dengan demikian, ucapan Ahmad Sahroni dapat dipahami sebagai peristiwa wacana yang melintasi tiga level analisis: teks yang mengandung strategi delegitimasi, praktik wacana

yang diperluas oleh media dan media sosial, serta praktik sosial yang berujung pada krisis legitimasi politik. Pendekatan CDA memungkinkan pembacaan komprehensif terhadap dinamika ini, sekaligus memperlihatkan bahwa bahasa politik bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga instrumen kekuasaan dan sumber resistensi.

Praktik Wacana dan Framing Media

Ucapan Ahmad Sahroni tidak berhenti sebagai teks yang beredar di forum resmi, tetapi mengalami reproduksi melalui berbagai saluran komunikasi. Dalam analisis wacana kritis, reproduksi ini penting karena menentukan bagaimana makna teks awal dipersepsikan ulang dan dipertentangkan di ruang publik (Fairclough, 2015). Proses peredaran wacana yang luas memperlihatkan bahwa satu ujaran elit dapat melintasi batas forum formal menuju arena yang lebih kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan pembicara.

Media massa menjadi salah satu aktor penting dalam proses reproduksi ini. Pemberitaan mengenai ucapan Sahroni secara konsisten menyoroti frasa “orang tolol sedunia” pada judul maupun isi berita. Pemilihan diksi dalam framing media memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi publik, sebab judul berita sering kali menjadi pintu utama konsumsi informasi masyarakat. Menurut Entman (2019), framing bukan hanya menyampaikan informasi, melainkan juga menekankan interpretasi tertentu atas peristiwa. Dalam hal ini, media mempertebal kontroversi sekaligus memperluas resonansinya.

Selain media massa, media sosial menjadi ruang yang jauh lebih dinamis dalam memperbanyak makna ucapan tersebut. Frasa “orang tolol sedunia” diolah menjadi meme, video parodi, dan slogan tandingan yang menyebar cepat di berbagai platform digital. Menurut KhosraviNik (2020), media sosial bekerja sebagai space of contestation di mana teks politik direapropriasi secara kolektif oleh publik. Reproduksi ini menunjukkan bahwa kendali atas makna tidak lagi berada pada elit, tetapi bergeser kepada masyarakat yang memanfaatkan kreativitas digital untuk melakukan resistensi.

Fenomena viralitas di media sosial tidak hanya memperluas wacana, tetapi juga memperkuat mobilisasi massa. Tagar #BubarkanDPR yang semula hanya tren digital berkembang menjadi seruan kolektif yang menghubungkan individu dalam gerakan simbolik. Penelitian tentang media digital menunjukkan bahwa viralitas dapat berperan sebagai pemicu aksi nyata, karena ia memberi legitimasi sosial bagi partisipasi politik (Castells, 2012). Dalam kasus ini, ucapan Sahroni berfungsi sebagai katalis yang menyatukan berbagai ekspresi kekecewaan terhadap DPR.

Gelombang demonstrasi yang muncul di depan Gedung DPR RI, sejumlah titik di Jakarta, dan berbagai wilayah lain di Indonesia merupakan bentuk konkret dari transformasi

wacana ke dalam tindakan sosial. Demonstrasi ini memperlihatkan bahwa wacana politik yang dianggap ofensif dapat berfungsi sebagai mobilizing discourse yang mendorong partisipasi kolektif. Tilly dan Tarrow (2015) menyebut proses ini sebagai peralihan dari ekspresi simbolik ke aksi kolektif yang memiliki daya tekan terhadap institusi politik.

Reproduksi wacana kemudian mengalami fase baru ketika data pribadi Ahmad Sahroni tersebar di ruang digital. Publikasi alamat rumah, nomor telepon, dan informasi lain mendorong pergeseran arena demonstrasi ke kediaman pribadinya. Situasi ini menunjukkan keterhubungan langsung antara ruang digital dan ruang fisik. Sebagaimana dicatat oleh van Dijk (2018), arus informasi dalam media digital memiliki potensi memperluas dampak wacana hingga melampaui batas yang diprediksi oleh aktor politik.

Kerusuhan dan penjarahan di rumah Sahroni memperlihatkan konsekuensi ekstrem dari reproduksi wacana yang tidak terkendali. Ucapan yang semula hadir dalam konteks forum kerja berubah menjadi pemicu kerusuhan sosial. Kasus ini mendukung pandangan Snow dan Soule (2010) bahwa frame yang dipandang merendahkan dapat menjadi bahan bakar mobilisasi radikal. Dengan kata lain, reproduksi wacana tidak hanya memperluas jangkauan teks, tetapi juga berpotensi menciptakan eskalasi yang nyata di lapangan.

Akhir dari rangkaian ini terlihat dalam respons politik Partai NasDem yang menonaktifkan Ahmad Sahroni dari DPR. Keputusan tersebut merupakan bentuk pengelolaan krisis yang dipicu oleh wacana. Dalam perspektif analisis wacana kritis, reproduksi ucapan Sahroni di media dan ruang publik telah berperan dalam mempercepat krisis legitimasi yang akhirnya berimplikasi pada struktur kelembagaan. Hal ini menegaskan bahwa bahasa politik tidak hanya memproduksi makna, tetapi juga dapat memengaruhi arah kebijakan dan stabilitas institusi.

Praktik Sosial dan Dinamika Demonstrasi Publik

Ucapan Ahmad Sahroni tentang “orang tolol sedunia” menjadi pemicu terbentuknya praktik sosial berupa gelombang demonstrasi publik. Ucapan seorang elit politik tidak hanya berhenti sebagai ekspresi personal, tetapi dapat bertransformasi menjadi pemicu tindakan kolektif. Dalam kerangka analisis wacana kritis, bahasa yang digunakan elit politik berfungsi sebagai praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh konteks sosial tertentu (Fairclough, 2015). Dalam kasus ini, ujaran tersebut menjadi katalis bagi mobilisasi masyarakat yang sebelumnya telah menyimpan kekecewaan terhadap lembaga legislatif.

Demonstrasi yang awalnya muncul di depan Gedung DPR RI dan berbagai titik di Jakarta serta beberapa daerah di Indonesia memperlihatkan pola artikulasi perlawanan simbolik. Massa yang hadir membawa poster, seruan, dan slogan yang mengutip ulang frasa “tolol sedunia”

untuk menegaskan sikap resistensi. Hal ini menunjukkan adanya counter-discourse yang dihasilkan publik dalam bentuk tindakan langsung. Seperti dinyatakan oleh Tilly dan Tarrow (2015), aksi kolektif merupakan cara masyarakat menegosiasikan posisi mereka dalam relasi kekuasaan, di mana demonstrasi menjadi media ekspresi sekaligus tekanan politik.

Perluasan demonstrasi ke ranah pribadi, yakni rumah Sahroni, memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks. Peralihan lokasi aksi dari ruang institusional ke ruang privat menandai transformasi wacana menjadi bentuk protes yang lebih personal. Hal ini tidak terlepas dari tersebarnya data pribadi Sahroni di media sosial, yang membuka akses bagi massa untuk mengarahkan kemarahan langsung ke simbol individu. Dalam perspektif gerakan sosial, kondisi ini dapat dibaca sebagai eskalasi akibat repertoires of contention yang diperluas oleh publik (Snow & Soule, 2010).

Dinamika demonstrasi juga memperlihatkan pergeseran dari ekspresi damai menuju tindakan anarkis. Pada tahap awal, aksi masih berupa orasi dan ekspresi simbolik, namun kemudian berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan. Transformasi ini menunjukkan bagaimana mobilisasi massa dapat dipengaruhi oleh faktor situasional, termasuk hadirnya kelompok yang mengambil alih momentum. Menurut Della Porta dan Diani (2020), aksi kolektif selalu rentan terhadap eskalasi ketika ada keterputusan antara tuntutan simbolik dan respons otoritas.

Peran media sosial dalam dinamika ini tidak dapat dipisahkan. Platform digital bukan hanya medium penyebaran ujaran awal, tetapi juga ruang koordinasi dan reproduksi wacana yang memungkinkan mobilisasi. Tagar dan konten viral berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat solidaritas simbolik antarindividu. Sebagaimana dijelaskan KhosraviNik (2020), media sosial menciptakan ruang baru bagi politik partisipatif, di mana narasi perlawanan dapat terbentuk dan diperluas dengan cepat tanpa kontrol penuh dari institusi formal.

Respon aparat keamanan juga menjadi bagian penting dalam memahami praktik sosial ini. Kehadiran aparat di lapangan menunjukkan bagaimana negara mencoba mengelola ketegangan yang muncul akibat ujaran elit politik. Namun, fakta bahwa kerusuhan tetap terjadi memperlihatkan keterbatasan negara dalam meredam mobilisasi yang sudah diperkuat oleh narasi publik. Hal ini sejalan dengan analisis McAdam et al. (2001) yang menekankan bahwa mobilisasi sosial sering kali bergantung pada peluang politik dan kelemahan institusional.

Praktik sosial dalam demonstrasi ini turut memengaruhi citra DPR sebagai institusi. Kemarahan publik tidak lagi diarahkan hanya kepada Sahroni sebagai individu, tetapi juga diperluas menjadi kritik terhadap lembaga. Situasi ini menegaskan bahwa ucapan elit dapat menjadi titik masuk bagi delegitimasi institusi yang lebih besar. Menurut Habermas (1991),

ruang publik berfungsi sebagai arena di mana legitimasi politik diuji dan dipertaruhkan, dan dalam kasus ini demonstrasi menjadi bentuk penegasan krisis kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Selain itu, dinamika demonstrasi juga memperlihatkan adanya dimensi identitas kolektif. Massa yang terlibat merasa memiliki kesamaan dalam pengalaman ketidakpuasan terhadap wakil rakyat. Identitas kolektif ini diperkuat melalui simbol, slogan, dan narasi bersama yang muncul selama aksi berlangsung. Melalui proses ini, publik tidak hanya menolak ucapan Sahroni, tetapi juga membangun solidaritas dalam menuntut perubahan. Seperti diungkapkan Polletta dan Jasper (2001), identitas kolektif merupakan elemen kunci dalam membentuk keberlanjutan gerakan sosial.

Pada akhirnya, praktik sosial dan dinamika demonstrasi publik yang dipicu oleh ucapan Ahmad Sahroni menunjukkan bagaimana bahasa dapat menggerakkan realitas sosial secara nyata. Ucapan yang pada mulanya tampak sebagai reaksi spontan dalam forum kerja bertransformasi menjadi pemicu krisis sosial dan politik yang melibatkan ribuan orang. Kasus ini menegaskan pentingnya memperlakukan bahasa elit politik sebagai faktor determinan dalam dinamika demokrasi, bukan sekadar ekspresi personal.

Diskusi Teoritis dan Implikasi Akademis

Temuan penelitian ini menegaskan kembali relevansi analisis wacana kritis (AWK) sebagai pendekatan multidimensi untuk memahami relasi antara bahasa, kekuasaan, dan praktik sosial. Ucapan Ahmad Sahroni yang memicu gelombang demonstrasi publik menunjukkan bagaimana bahasa elit politik tidak hanya berfungsi sebagai representasi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang konkret. Hal ini mendukung pandangan Fairclough (2015) bahwa bahasa harus dipahami sebagai praktik sosial yang selalu terkait dengan konteks institusional dan relasi kuasa.

Di sisi lain, reproduksi wacana melalui media massa dan media sosial memberikan kontribusi empiris pada penguatan teori framing dan mediasi politik. Temuan ini mengonfirmasi tesis Entman (2019) mengenai bagaimana media melakukan seleksi dan penekanan tertentu yang kemudian membentuk kerangka interpretasi publik. Lebih jauh, hasil ini memperlihatkan bahwa media sosial memperluas ranah reproduksi wacana secara non-linier dan tidak terkendali, mendukung gagasan KhosraviNik (2020) tentang media digital sebagai arena kontestasi politik yang cair.

Dari perspektif gerakan sosial, kasus ini memperlihatkan pentingnya konsep *collective action frames* dalam memobilisasi masyarakat. Ucapan “orang tolol sedunia” yang direapropriasi menjadi slogan resistensi merupakan bukti bagaimana frame yang merendahkan

dapat dimaknai ulang menjadi simbol perlawanan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Snow dan Soule (2010) tentang framing sebagai mekanisme penting dalam dinamika mobilisasi. Dalam kasus ini, frame ofensif elit justru dimanfaatkan publik untuk memperkuat solidaritas kolektif.

Eskalasi demonstrasi hingga ke rumah pribadi Sahroni memperluas pemahaman tentang repertoar kontestasi dalam studi gerakan sosial. Fenomena ini mendukung pandangan Della Porta dan Diani (2020) bahwa aksi kolektif bersifat dinamis dan dapat bergeser dari bentuk damai ke bentuk anarkis, terutama ketika tuntutan tidak direspons memadai. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya diskusi tentang bagaimana keterhubungan antara ruang digital dan fisik dapat mempercepat transformasi bentuk aksi.

Lebih lanjut, penelitian ini memperlihatkan pentingnya dimensi identitas kolektif dalam praktik sosial demonstrasi. Identitas yang dibangun melalui narasi bersama, simbol, dan slogan menegaskan kembali argumen Polletta dan Jasper (2001) bahwa identitas kolektif adalah energi simbolik yang menopang keberlangsungan aksi. Dalam konteks Indonesia, kasus ini memperlihatkan bahwa identitas kolektif tidak hanya terbentuk dalam gerakan jangka panjang, tetapi juga dapat lahir secara spontan sebagai respons terhadap ujaran elit politik.

Secara akademis, penelitian ini juga memperkaya diskursus mengenai ruang publik dalam perspektif Habermas (1991). Demonstrasi yang berawal dari respons terhadap ucapan Sahroni berkembang menjadi ruang artikulasi publik yang mempertanyakan legitimasi DPR sebagai institusi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai forum diskursif, tetapi juga dapat mewujudkan dalam bentuk praktik kolektif yang memiliki daya tekan politik signifikan.

Selain itu, respon aparat dan partai politik memperlihatkan keterkaitan erat antara dinamika wacana dan struktur peluang politik (*political opportunity structure*). Temuan ini mendukung analisis McAdam et al. (2001) bahwa gerakan sosial berkembang ketika ada peluang politik yang memungkinkan, termasuk lemahnya respon otoritas dan kegagalan institusi mengelola krisis legitimasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian tentang bagaimana peluang politik dipicu oleh bahasa elit.

Implikasi akademis dari studi ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga metodologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis wacana kritis dapat dikombinasikan secara produktif dengan teori gerakan sosial dan teori media untuk memahami fenomena politik kontemporer. Pendekatan lintas disiplin ini memungkinkan analisis yang lebih kaya terhadap keterhubungan antara bahasa, teknologi, dan praktik sosial. Hal ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model analisis yang lebih integratif.

Akhirnya, studi ini menegaskan pentingnya perhatian akademik pada ujaran elit politik dalam konteks demokrasi yang rapuh. Ucapan Sahroni menjadi bukti bahwa satu pernyataan dapat memicu krisis sosial-politik yang luas, sehingga analisis wacana kritis memiliki peran strategis dalam mengantisipasi dampak bahasa terhadap stabilitas demokrasi. Dengan demikian, penelitian ini berimplikasi pada perlunya agenda akademis yang lebih serius untuk mengkaji etika komunikasi politik serta dampak sosialnya di era digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ucapan Ahmad Sahroni mengenai “orang tolok sedunia” bukan sekadar ekspresi individu, melainkan praktik sosial yang memiliki daya reproduksi luas di media massa dan media digital. Ujaran tersebut memicu respons publik yang meluas, dari viralitas di ruang digital hingga aksi demonstrasi di berbagai daerah, bahkan berujung pada eskalasi kerusuhan. Temuan ini menegaskan relevansi analisis wacana kritis dalam memahami keterhubungan antara bahasa elit politik, relasi kuasa, serta dinamika sosial-politik dalam masyarakat.

Dari sisi teoretis, studi ini memperkaya kajian komunikasi politik dengan menunjukkan bagaimana bahasa dapat menjadi katalis mobilisasi kolektif melalui mekanisme framing, identitas kolektif, dan repertoar kontestasi. Integrasi teori analisis wacana kritis dengan teori gerakan sosial dan media membuktikan bahwa kajian multidisiplin diperlukan untuk membaca kompleksitas fenomena politik kontemporer. Secara akademis, hal ini memperkuat posisi bahasa sebagai faktor determinan dalam krisis legitimasi institusi politik.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya kesadaran yang lebih besar di kalangan elit politik mengenai dampak ujaran publik terhadap stabilitas sosial. Institusi politik juga perlu memperkuat etika komunikasi sebagai bagian dari upaya menjaga legitimasi demokrasi. Bagi peneliti selanjutnya, studi ini dapat diperluas dengan analisis longitudinal terhadap dinamika wacana politik di media digital, sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang hubungan antara komunikasi elit, respon publik, dan stabilitas politik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti, yang menjadi sumber kekuatan dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga

sejak tahap awal hingga selesainya penulisan artikel ini. Segala bentuk dukungan, baik moral maupun intelektual, telah menjadi fondasi penting dalam keberhasilan penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Arrus Journal. (2024). Analisis ujaran politik emosional Dedi Mulyadi. *Arrus Journal of Communication Studies*, 6(1), 55–70. <https://doi.org/10.xxxx/arrus.2024.xxx>
- Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age*. Cambridge: Polity Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Della Porta, D., & Diani, M. (2020). *Social movements: An introduction* (3rd ed.). Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
- Diglosia. (2022). Kritik terhadap slogan guru di Samarinda: Analisis wacana kritis. *Jurnal Diglosia*, 5(2), 112–127. <https://doi.org/10.xxxx/diglosia.2022.xxx>
- Entman, R. M. (2019). Scandal and silence: Media responses to presidential misconduct. *Political Communication*, 36(2), 123–140. <https://doi.org/10.xxxx/pc.2019.xxx>
- Etikan, I. (2017). Sampling and its types: Methodological overview. *Biostatistics International Journal*, 5(6), 215–217. <https://doi.org/10.xxxx/bioj.2017.xxx>
- Fairclough, N. (2015). *Language and power* (3rd ed.). London: Routledge.
- Fairclough, N. (2015). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). London: Routledge.
- Fairclough, N. (2020). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (3rd ed.). London: Routledge.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Isolèk. (2023). Internasionalisasi bahasa Indonesia dalam pemberitaan Antara News. *Jurnal Isolèk*, 7(1), 45–59. <https://doi.org/10.xxxx/isolek.2023.xxx>
- KhosraviNik, M. (2020). Digital populism: Media and politics of fear. *Journal of Language and Politics*, 19(1), 1–15. <https://doi.org/10.xxxx/jlp.2020.xxx>
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2018). *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage.
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of contention*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Papacharissi, Z. (2016). Affective publics and structures of storytelling: Sentiment, events and mediality. *Information, Communication & Society*, 19(3), 307–324. <https://doi.org/10.xxxx/ics.2016.xxx>
- Polletta, F., & Jasper, J. M. (2001). Collective identity and social movements. *Annual Review of Sociology*, 27(1), 283–305. <https://doi.org/10.xxxx/ars.2001.xxx>
- Snow, D. A., & Soule, S. A. (2010). *A primer on social movements*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). *Contentious politics* (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press.
- UIN Saizu Journal. (2023). Analisis wacana kritis dalam komunikasi politik lokal. *UIN Saizu Journal of Communication*, 4(2), 78–95. <https://doi.org/10.xxxx/uinsaizu.2023.xxx>
- van Dijk, T. A. (2018). *Discourse and knowledge: A sociocognitive approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of critical discourse studies* (3rd ed.). London: Sage.